Copyright © 2026 The Author(s)
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 15 No. 1 Februari 2026

Analisis Keselarasan Mutu Kelembagaan dan Mutu Hasil Belajar di Kota Tidore Kepulauan

Washliyatul Qodari[1], Said Hasan[2], Marwia Tamrin Bakar[3]
[1,2,3]Universitas Khairun, Indonesia

[1]washliya.q@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.58230/27454312.3306

Abstrak

Penelitian ini menganalisis keselarasan antara mutu kelembagaan (*structural quality*) yang diwakili oleh akreditasi (BAN-PDM, 2025) dan hasil pembelajaran (*functional quality*) yang diwakili oleh capaian literasi-numerasi (Rapor Pendidikan, 2025) di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Melalui pendekatan deskriptif kuantitatif, sampel sebanyak 164 satuan pendidikan ditentukan secara purposive dan dianalisis menggunakan matriks keselarasan untuk memetakan akreditasi dengan komposit literasi-numerasi dalam tiga kelompok utama: selaras, kesenjangan negatif, dan kesenjangan positif. Temuan mengungkap kesenjangan negatif antara akreditasi dan komposit literasi-numerasi. Sebanyak 20,5% satuan pendidikan berakreditasi A berkategori "Kurang" pada komposit literasi-numerasi, 51,3% berkategori "Sedang" pada komposit literasi-numerasi, dan 56,7% satuan pendidikan berakreditasi B berkategori "Kurang" pada komposit literasi-numerasi. Hasil ini mengindikasikan lemahnya konsistensi antara mutu struktural dan kinerja proses inti pembelajaran (*technical core*), yang menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan belum terintegrasi secara optimal. Temuan ini menunjukkan perlunya pemanfaatan data capaian hasil belajar secara lebih optimal dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, sehingga evaluasi mutu tidak hanya merefleksikan kelengkapan struktural, tetapi juga mutu hasil belajar peserta didik.

Kata kunci: Mutu Pendidikan, Akreditasi Sekolah, Literasi-Numerasi

Pendahuluan

Pendidikan memegang peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global, sekaligus menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa (OECD, 2023). Sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan, Indonesia melakukan perubahan besar dalam sistem evaluasi pendidikannya, dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Nasional (AN) yang lebih komprehensif. Asesmen Nasional tidak hanya mengukur hasil akademik siswa, tetapi juga memotret kualitas proses pembelajaran melalui tiga instrumen utama: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar (Pusat Asesmen Pendidikan, 2023).

Hasil Asesmen Nasional ini kemudian diintegrasikan dalam platform Rapor Pendidikan. Platform ini menjadi sumber data utama bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam melakukan Perencanaan Berbasis Data (PBD). (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2024) menjelaskan bahwa PBD dilakukan melalui siklus Identifikasi, Refleksi, dan Benahi. Penelitian Musakirawati et al. (2023) membuktikan bahwa penggunaan Rapor Pendidikan dalam PBD efektif untuk mengidentifikasi akar permasalahan pendidikan.

Perubahan sistem evaluasi ini diiringi dengan transformasi kebijakan akreditasi dengan menerbitkan peraturan akreditasi terbaru (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

Dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Menengah, 2023). Peraturan ini tidak hanya menjadi landasan hukum bagi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM), tetapi juga memperkenalkan paradigma baru dalam sistem penjaminan mutu eksternal. Salah satu inovasi utamanya adalah mekanisme Akreditasi Ulang melalui automasi yang memungkinkan perpanjangan status akreditasi berdasarkan analisis data dari profil dan rapor satuan pendidikan serta data pokok pendidikan (BAN-PDM, 2025b). Mekanisme ini menandai pergeseran menuju pendekatan yang lebih berbasis data.

Efektivitas sistem pendidikan secara teori dapat dianalisis melalui pendekatan teori sistem terbuka (Hoy & Miskel, 2012) yang memandang satuan pendidikan sebagai organisasi yang kompleks. Berdasarkan pendekatan teori ini, akreditasi satuan pendidikan merepresentasikan *structural quality* (elemen struktur formal kelembagaan), sementara *functional quality* yang tercermin dari capaian literasi-numerasi mencerminkan efektivitas proses inti pembelajaran (*technical core*) dalam menghasilkan hasil belajar. Dalam sistem penjaminan mutu yang ideal, kedua indikator ini (*structural quality* dan *technical core*) diharapkan saling selaras dan memperkuat satu sama lain.

Implementasi sistem penjaminan mutu dalam praktiknya menunjukkan kompleksitas yang tidak sederhana. Literatur internasional memaparkan temuan yang beragam mengenai hubungan antara kualitas kelembagaan dan hasil belajar. Alenezi et al. (2023) menemukan bahwa akreditasi dapat meningkatkan nilai rata-rata siswa melalui proses perencanaan dan evaluasi diri yang baik. Sebaliknya, Gautam (2024) di India dan Guziak et al. (2025) di Polandia menemukan bahwa akreditasi tinggi tidak menjamin hasil belajar optimal. Shal et al. (2024) bahkan menemukan bahwa akreditasi justru dianggap tidak berdampak pada proses belajar-mengajar di beberapa satuan pendidikan.

Kondisi serupa juga terlihat dalam konteks Indonesia. Azizah et al. (2024) menunjukkan bahwa akreditasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan secara komprehensif. Namun di sisi lain, Asrijanty (2019) menemukan hubungan yang lemah antara akreditasi satuan pendidikan dan hasil Ujian Nasional. Studi Meirani et al. (2022) mengungkap bahwa satuan pendidikan berakreditasi A pun bisa memiliki masalah dalam kompetensi guru dan pengelolaan sarana.

Berdasarkan kerangka teori dan bukti empiris yang beragam tersebut, penelitian ini ingin mengeksplorasi keselarasan antara kualitas kelembagaan dan hasil pembelajaran di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Pemilihan lokasi ini memiliki alasan strategis. Secara geografis, Tidore Kepulauan mewakili karakteristik wilayah Indonesia Timur dengan kondisi kepulauan. Secara kebijakan, data BAN-PDM 2025 menunjukkan fenomena menarik yaitu tidak ada satupun satuan pendidikan yang berstatus Tidak Terakreditasi di wilayah ini. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk mengekplorasi apakah keseragaman status akreditasi yang baik ini diiringi dengan keseragaman kualitas hasil belajarnya.

Penelitian ini dirancang dengan tiga tujuan. Pertama, menganalisis distribusi mutu kelembagaan berdasarkan akreditasi dan mutu hasil belajar berdasarkan capaian literasi-numerasi. Kedua, menggambarkan capaian komposit literasi-numerasi siswa. Ketiga, memetakan keselarasan antara akreditasi dan hasil literasi-numerasi sebagai dasar perencanaan intervensi kebijakan.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian tentang efektivitas sistem penjaminan mutu pendidikan. Secara metodologis, penelitian memperkenalkan pendekatan pemetaan keselarasan berbasis komposit literasi-numerasi. Secara empiris, penelitian menyediakan bukti lapangan efektivitas sistem penjaminan mutu di wilayah kepulauan. Secara

Copyright © 2026 The Author(s)

kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan program pendidikan yang tepat sasaran.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk memetakan keselarasan mutu pendidikan secara sistematis. Pendekatan ini tepat untuk menggambarkan fakta secara akurat tanpa menguji hubungan kausal, sehingga landasan bagi rekomendasi kebijakan menjadi berbasis bukti (Sugiyono, 2022). Landasan teoretisnya adalah *open system approach* (Hoy & Miskel, 2012), yang memandang efektivitas satuan pendidikan sebagai hasil interaksi dinamis antara *structural quality*, yang diwakili oleh mutu kelembagaan melalui akreditasi dan *functional quality* yang tercermin dari hasil belajar berupa capaian literasi-numerasi. Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, pemetaan keselarasan mutu dilakukan untuk menilai apakah kedua indikator tersebut saling sejalan atau justru menunjukkan kesenjangan mutu.

Populasi penelitian mencakup seluruh satuan pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA di Kota Tidore Kepulauan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, baik negeri maupun swasta yang berjumlah 168 satuan pendidikan. Pemilihan ketiga jenjang ini didasarkan pada pertimbangan untuk memfokuskan analisis pada satu kesatuan jalur pendidikan dasar dan menengah umum, yang memiliki karakteristik dan tujuan kurikulum inti yang relatif seragam. Sampel ditentukan secara purposive dengan kriteria memiliki data akreditasi terkini serta capaian literasi-numerasi tahun 2025. Sebanyak 164 satuan pendidikan yang memenuhi kriteria ini kemudian ditetapkan sebagai sampel penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari dua sumber yaitu(1) Data Akreditasi Satuan pendidikan (BAN-PDM, 2025a) berkategori A, B, C sebagai representasi Mutu Kelembagaan; dan (2) Data Rapor Pendidikan 2025 yang mencakup capaian Literasi dan Numerasi (kategori Baik, Sedang, Kurang). Penggunaan data ini selaras dengan Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 yang menjadikan Rapor Pendidikan sebagai sumber data akreditasi.

Analisis keselarasan dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, dilakukan tabulasi data deskriptif. Kedua, dibentuk Komposit Literasi-Numerasi menggunakan pendekatan klasifikasi minimum (diambil nilai terendah antara Literasi atau Numerasi). Pendekatan ini dipilih mengingat Literasi dan Numerasi merupakan kompetensi dasar yang saling bergantung, di mana kelemahan pada satu aspek dapat menghambat kemampuan siswa dalam memperoleh manfaat optimal dari proses pendidikan secara keseluruhan (OECD, 2023). Ketiga, setelah Komposit Literasi-Numerasi terbentuk, data akreditasi dan komposit Literasi–Numerasi dipetakan dalam matriks keselarasan mutu. Pendekatan ini mengadopsi logika perbandingan sistematis *Comparative Framework* (Rijn et al., 2024) yang digunakan untuk membandingkan secara sistematis instrumen asesmen skala besar. Seluruh proses tabulasi dan organisasi data difasilitasi oleh perangkat lunak spreadsheet.

Matriks keselarasan dirancang dengan mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi antara tiga kategori akreditasi (A, B, C) dan tiga kategori komposit literasi-numerasi (Baik, Sedang, Kurang). Pola-pola yang terbentuk dalam matriks tersebut kemudian dikategorikan menjadi tiga kondisi utama: (1) Selaras (kesesuaian antara akreditasi dan hasil belajar); (2) Kesenjangan Negatif (akreditasi lebih tinggi dari hasil belajar); dan (3) Kesenjangan Positif (akreditasi lebih rendah dari hasil belajar). Kategorisasi "mayor" dan "minor" dalam kesenjangan didasarkan pada besarnya jarak antara peringkat akreditasi dan capaian hasil belajar. Kesenjangan mayor merujuk pada ketidaksesuaian ekstrem (misalnya: A-Kurang atau C-

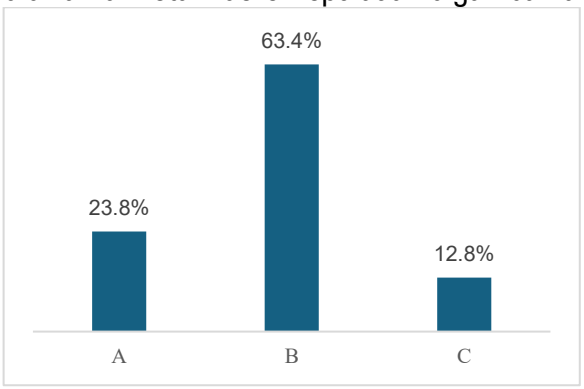
Baik), sementara kesenjangan minor menunjukkan ketidaksesuaian dengan jarak satu level (misalnya: A-Sedang atau B-Baik). Kategorisasi ini memungkinkan analisis yang lebih terarah untuk tujuan rekomendasi kebijakan.

Hasil matriks keselarasan mutu, dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pola distribusi dan proporsi keselarasan. Analisis kemudian diperkaya dengan interpretasi teoretis berdasarkan *Open System Theory* Hoy & Miskel (2012) dan literatur terkait. Validitas data dijamin melalui penggunaan sumber resmi (BAN-PDM dan Rapor Pendidikan). Keandalan analisis dijaga dengan konsistensi prosedur dalam pembentukan matriks keselarasan

Hasil

Distribusi Akreditasi Satuan pendidikan

Berdasarkan data akreditasi terbaru dari BAN-PDM 2025 (BAN-PDM, 2025a) kondisi mutu kelembagaan satuan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan digambarkan sebagai berikut :



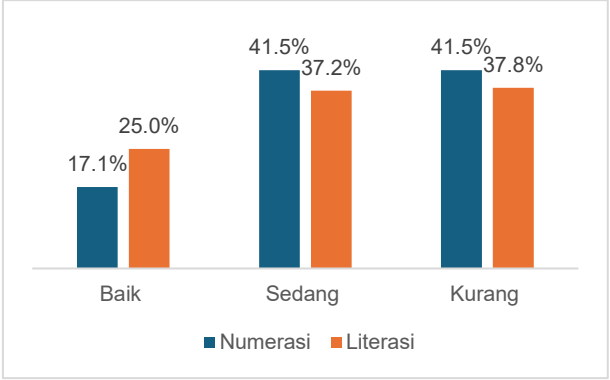
Gambar 1. Distribusi satuan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Akreditasi BAN-PDM

Gambar 1. menunjukkan pola distribusi yang didominasi oleh kategori B, yaitu 63,4% dari total 164 satuan pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas satuan pendidikan telah memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) namun belum mencapai kinerja kelembagaan yang optimal. Kondisi ini dilengkapi dengan distribusi kategori A (Sangat Baik) sebesar 23,8% dan kategori C (Kurang/Tidak Memenuhi) sebesar 12,8%.

Konsentrasi data yang tinggi pada Akreditasi B dan A (total 87,2%) secara administratif menggambarkan bahwa secara struktural, sebagian besar satuan pendidikan memiliki mutu kelembagaan yang terjamin. Namun, persentase satuan pendidikan yang masih berakreditasi C (12,8%) menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam pemenuhan standar dasar kelembagaan.

Distribusi Literasi dan Numerasi

Capaian hasil belajar siswa dalam aspek literasi dan numerasi berdasarkan Rapor Pendidikan 2025 (Gambar 2) menunjukkan hasil yang bervariasi dan cenderung menengah ke bawah.



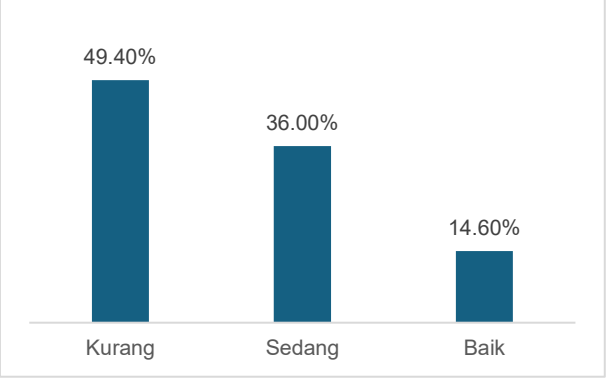
Copyright © 2026 The Author(s)

Gambar 2. Distribusi satuan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Capaian Literasi dan Numerasi di Rapor Pendidikan 2025

Pada indikator literasi, proporsi satuan pendidikan dengan kategori Baik mencapai 25%, Sedang 37,2%, dan Kurang 37,8%. Sedangkan pada indikator numerasi, distribusinya menunjukkan kondisi yang lebih lemah, dengan kategori Baik 17,1%, Sedang 41,5%, dan Kurang 41,5%. Perbandingan kedua indikator ini menunjukkan bahwa aspek numerasi menjadi titik lemah utama pembelajaran dasar di wilayah Tidore Kepulauan.

Capaian Komposit Literasi-Numerasi

Berdasarkan pendekatan klasifikasi minimum yang menitikberatkan pada kemampuan terlemah, hasil komposit Literasi-Numerasi satuan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Analisis komposit yang mempertimbangkan capaian terendah antara literasi dan numerasi ini mengungkap bahwa hampir separuh satuan pendidikan (49,4% atau 81 satuan pendidikan) berada dalam kategori Kurang. Sementara itu, 59 satuan pendidikan (36,0%) mencapai kategori Sedang, dan hanya 24 satuan pendidikan (14,6%) yang berhasil meraih kategori Baik. Data ini memperlihatkan bahwa mayoritas satuan pendidikan (85,4%) berada pada level capaian Kurang hingga Sedang. Distribusi capaian komposit ini dapat dilihat secara visual pada Gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3. Distribusi Capaian Komposit Literasi-Numerasi satuan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan

Pemetaan Keselarasan Mutu

Analisis keselarasan mutu dilakukan dengan memetakan hubungan antara kategori akreditasi dan capaian komposit Literasi-Numerasi ke dalam suatu matriks logika. Pemetaan ini bertujuan mengidentifikasi pola keselarasan maupun ketidakselarasan (kesenjangan) antara kedua indikator mutu tersebut. Hasil pemetaan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kelompok utama yaitu selaras, kesenjangan negatif dan kesenjangan positif berdasarkan tingkat konsistensi antara kondisi kelembagaan dan hasil pembelajaran yang dicapai.

Pengelompokan ini memungkinkan identifikasi satuan pendidikan yang memerlukan intervensi prioritas, khususnya pada satuan pendidikan yang menunjukkan kesenjangan besar antara mutu struktural dan fungsional. Matriks keselarasan yang dihasilkan memberikan gambaran komprehensif tentang pola sebaran mutu pendidikan di tingkat daerah. Hasil pemetaan secara lengkap disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Matriks Keselarasan Akreditasi dan Komposit Literasi-Numerasi Satuan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan (2025)

Akreditasi	Komposit Literasi–Numerasi	Jumlah Satuan pendidikan	% per Akreditasi	Interpretasi Keselarasan
A	Baik	11	28,2%	Selaras tinggi
	Sedang	20	51,3%	Kesenjangan Negatif – Minor

	Kurang	8	20,5%	Kesenjangan Negatif – Mayor
B	Baik	11	10,6%	Kesenjangan Positif – Minor
	Sedang	34	32,7%	Selaras menengah
	Kurang	59	56,7%	Kesenjangan Negatif – Minor
C	Baik	2	9,5%	Kesenjangan Positif – Mayor
	Sedang	5	23,8%	Kesenjangan Positif – Minor
	Kurang	14	66,7%	Selaras rendah

Tabel 1 menunjukkan bahwa pola kesenjangan antara akreditasi dan capaian komposit literasi–numerasi lebih dominan dibandingkan pola keselarasan. Pada akreditasi A, keselarasan tinggi hanya terjadi pada 28,2% satuan pendidikan (komposit Baik), sedangkan 51,3% berada pada kategori Sedang dan 20,5% pada kategori Kurang sebagai bentuk kesenjangan negatif. Pada akreditasi B, kesenjangan negatif tampak lebih kuat karena 56,7% satuan pendidikan berada pada kategori Kurang dan hanya 10,6% mencapai Baik. Sementara itu, pada akreditasi C, sebagian besar satuan pendidikan (66,7%) menunjukkan keselarasan pada level rendah (komposit Kurang), namun terdapat pula 23,8% pada kategori Sedang dan 9,5% pada kategori Baik yang mencerminkan kesenjangan positif. Secara keseluruhan, Secara keseluruhan, tabel ini menegaskan bahwa mutu struktural satuan pendidikan belum selalu sejalan dengan hasil belajar peserta didik.

Pembahasan

Pola Keselarasan

Pola keselarasan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh tiga kelompok satuan pendidikan yang membuktikan konsistensi antara kondisi struktural dan hasil pembelajaran, sebagaimana diprediksi dalam kerangka sistem terbuka.

Kelompok pertama adalah satuan pendidikan berakreditasi A dengan komposit Baik (28,2%), yang merepresentasikan keselarasan tinggi. Keselarasan ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan yang kuat berhasil ditransformasikan oleh proses pembelajaran di kelas (*technical core*) menjadi hasil belajar yang optimal. Temuan ini memperoleh konfirmasi dari penelitian Alenezi et al. (2023) yang membuktikan bahwa proses akreditasi yang baik, melalui perencanaan dan evaluasi diri yang konsisten, secara nyata dapat mendorong peningkatan nilai rata-rata siswa.

Kelompok kedua adalah pola keselarasan pada level menengah, yaitu satuan pendidikan berakreditasi B dengan komposit Sedang (32,7%). Kondisi ini merefleksikan mutu kelembagaan yang cukup secara konsisten menghasilkan capaian belajar yang juga berada pada level menengah. Pola keselarasan ini didukung oleh Azizah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa instrumen akreditasi berfungsi optimal sebagai alat pemeriksa yang akurat merekam kondisi satuan pendidikan level menengah, sekaligus sebagai pendorong yang dapat membantu perubahan, baik untuk mempertahankan kondisi yang sudah baik maupun mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Kelompok ketiga adalah pola keselarasan pada level yang rendah, yaitu satuan pendidikan berakreditasi C dengan komposit Kurang (66,7%). Kondisi ini mengonfirmasi bahwa kelemahan pada struktur kelembagaan secara konsisten berujung pada *outcome* pembelajaran yang rendah. Bukti empiris untuk pola ini diperkuat oleh studi kasus Asrikadayani et al. (2024) pada sebuah satuan pendidikan berakreditasi C, yang mengungkap bahwa rendahnya peringkat akreditasi khususnya pada aspek manajemen satuan pendidikan dan pengelolaan kurikulum berjalan beriringan dengan lemahnya hasil belajar siswa, yang tercermin dari menurunnya kemampuan literasi dan numerasi.

Copyright © 2026 The Author(s)

Ketiga pola keselarasan ini menggambarkan hubungan yang konsisten antara kondisi struktural satuan pendidikan dan hasil pembelajaran yang dicapai, sejalan dengan konsep transformasi efektif dalam *open system theory* (Hoy & Miskel, 2012). Hal ini membuktikan efektivitas transformasi yaitu struktur kelembagaan yang kuat (Akreditasi A) menghasilkan outcome tinggi, struktur yang memadai (Akreditasi B) menghasilkan outcome menengah, dan keterbatasan struktural (Akreditasi C) secara prediktif menghasilkan outcome yang rendah.

Pola Kesenjangan Negatif

Pola ini tampak pada 3 kelompok yaitu kesenjangan negatif minor A-Sedang (51,3%); kesenjangan negatif mayor A-Kurang (20,5%) dan kesenjangan negatif minor B-Kurang (56,7%). Berdasarkan teori sistem terbuka, ketidakselarasan ini mencerminkan ketidakefektifan transformasi pada proses inti pembelajaran (*technical core*), di mana kekuatan struktural (akreditasi A/B) tidak ditransformasikan menjadi peningkatan hasil pembelajaran. Fenomena kesenjangan negatif secara spesifik mengindikasikan adanya tantangan manajerial di tingkat satuan pendidikan, di mana sistem administrasi yang kuat ternyata tidak diikuti oleh perbaikan kualitas pembelajaran.

Ketidakselarasan pada kelompok kesenjangan negatif ini sesuai dengan penelitian Gautam (2024) di India dan Guziak et al. (2025) di Polandia yang menemukan bahwa akreditasi tinggi tidak otomatis menghasilkan pencapaian belajar yang optimal. Artinya, ketidakcocokan antara kualitas mutu kelembagaan satuan pendidikan dan kualitas hasil belajar siswa merupakan masalah yang juga terjadi di berbagai negara. Temuan Kesenjangan ini juga memperkuat temuan penelitian Asrijanty (2019) di Indonesia yang menemukan hubungan lemah antara peringkat akreditasi satuan pendidikan dan nilai ujian siswa.

Temuan ketidakselarasan negatif ini menegaskan kembali bahwa kekuatan struktural kelembagaan belum terkonversi secara efektif menjadi peningkatan hasil pembelajaran. Oleh karena itu, kelompok ini menjadi fokus utama diagnosis mutu untuk mengidentifikasi akar permasalahan pada proses inti pembelajaran.

Pola Kesenjangan Positif

Menariknya, pada penelitian ini ditemukan adanya pola kesenjangan positif yang menunjukkan adanya anomali keberhasilan pada satuan pendidikan yang mempunyai capaian komposit Literasi-Numerasi lebih tinggi dari ekspektasi akreditasinya.

Pola ini tampak pada tiga kelompok. Pertama, kesenjangan positif mayor (C-Baik, 9,5%) yang merepresentasikan anomali keberhasilan tertinggi karena capaian hasil belajar Baik dicapai meskipun struktur kelembagaan berada pada peringkat terendah. Kelompok kedua, kesenjangan positif minor (B-Baik, 10,6%), dimana hasil belajar tinggi melampaui ekspektasi kelembagaan menengah. Kelompok yang ketiga adalah kesenjangan positif minor (C-Sedang, 23,8%) yang menunjukkan peningkatan signifikan dari titik awal struktural yang sangat rendah.

Temuan pola kesenjangan positif ini memperoleh dukungan empiris yang kuat dari penelitian Sukriyah et al. (2019) mengungkapkan bahwa guru dari satuan pendidikan terakreditasi C mampu memberikan jawaban yang lebih lengkap dan metodis pada tes pemecahan masalah dibandingkan guru dari satuan pendidikan A. Siswanya juga menunjukkan kedalaman penyelesaian masalah yang tidak kalah. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan antara *structural quality* (akreditasi) dan efektivitas proses inti pembelajaran (*technical core*). Proses pembelajaran di tingkat kelas menunjukkan potensi untuk berjalan secara efektif meskipun elemen struktur formal kelembagaannya belum teroptimalkan.

Kondisi anomali keberhasilan ini menjadi penting, terutama pada satuan pendidikan berperingkat C yang pada praktiknya dihadapkan pada tantangan struktural yang signifikan, seperti kurangnya kelengkapan dokumen administratif, manajemen yang belum optimal, dan strategi pembelajaran guru yang belum variatif (Asrikadayani et al., 2024). Oleh karena itu,

satuan pendidikan ini membuktikan bahwa faktor SDM dan *technical core* (proses pembelajaran di kelas) dapat mengatasi kelemahan struktural (akreditasi rendah).

Satuan pendidikan-satuan pendidikan dengan profil C-Baik ini dapat menjadi subjek studi lebih lanjut oleh BAN-PDM untuk mengidentifikasi praktik baik yang dapat direplikasi, sekaligus menjadi pertimbangan dalam proses akreditasi ulang sebagaimana diatur dalam pedoman akreditasi mengenai dugaan peningkatan mutu. Satuan pendidikan-satuan pendidikan ini juga dapat dijadikan model pembelajaran sejawat dalam kebijakan daerah, sehingga inovasi pembelajaran kontekstual dapat direplikasi untuk satuan pendidikan lain dengan profil kelembagaan serupa.

Akar Kesenjangan Mutu

Temuan kesenjangan mutu negatif dari peringkat akreditasi dengan komposit Literasi-Numerasi mengindikasikan adanya kecenderungan ketidakterhubungan antara mutu struktural dan mutu fungsional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakefektifan pada proses inti pembelajaran (*technical core*) satuan pendidikan. Berdasarkan *open system theory* (Hoy & Miskel, 2012), ketidakefektifan pada proses inti yang mencakup manajemen pembelajaran dan proses belajar mengajar inilah yang menjadi akar permasalahan utama. Sebaliknya, temuan kesenjangan positif menegaskan bahwa hasil belajar sangat ditentukan oleh faktor input dan proses (SDM/Guru), bukan hanya faktor struktural (akreditasi), sehingga fokus diagnosis harus diarahkan pada *technical core.*

Ketidakefektifan *technical core* ini berakar pada lemahnya integrasi fungsional antara sistem evaluasi eksternal yang statis (akreditasi) dan sistem perbaikan internal yang dinamis (PBD). Meskipun intrumen akreditasi telah telah dirancang secara substantif untuk menilai kinerja, berfokus pada kualitas proses pembelajaran, kepemimpinan, dan hasil belajar, alih-alih hanya kelengkapan dokumen (Azizah et al., 2024), namun kesenjangan mutu tetap muncul diduga karena budaya implementasi di lapangan masih fokus pada dokumen administrasi. Hal ini mendukung temuan bahwa tekanan untuk memenuhi tuntutan administratif Akreditasi seringkali menggeser fokus satuan pendidikan dari peningkatan kualitas pembelajaran (*technical core*) (Adiyaman & Ozmantar, 2023; Afriliandhi & Hasanah, 2022). Akibatnya, Akreditasi berpotensi belum sepenuhnya menangkap kualitas *technical core* yang sesungguhnya karena hasilnya rentan terhadap fokus seremonial saat kunjungan akreditasi (Shal et al., 2024).

Ketidakefektifan *technical core* ini juga bisa terjadi karena mekanisme perbaikan internal, yaitu siklus Perencanaan Berbasis Data (PBD) tidak terlaksana dengan baik. Siklus identifikasi, refleksi dan benahi pada PBD untuk merespons dan menginternalisasi umpan bali belum dilakukan secara berkala. Tanpa siklus PBD yang konsisten, akreditasi berisiko menjadi sekadar pemenuhan administratif yang tidak berdampak substantif pada kualitas pembelajaran di kelas. Belum optimalnya PBD didukung oleh temuan kendala mendasar pada level satuan pendidikan, seperti rendahnya motivasi guru untuk melakukan perubahan dan keterbatasan penguasaan teknologi untuk perencanaan berbasis data (Purwadi et al., 2025).

Kesenjangan mutu yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan bisa ditutup dengan membangun siklus yang terintegrasi antara evaluasi eksternal dan perbaikan internal untuk menciptakan model penjaminan mutu yang efektif (Shalahuddin et al., 2025). Rapor Pendidikan, sebagai instrumen resmi dengan siklus tahunan yang dirancang untuk mendiagnosis akar permasalahan secara komprehensif (Musakirawati et al., 2023), menjadi petunjuk untuk menjembatani keterbatasan objektivitas dan frekuensi akreditasi. Kebijakan akutomasi akreditasi pada pada akreditasi ulang (BAN-PDM, 2025b) merupakan langkah strategis untuk mendorong integrasi ini, di mana data dinamis Rapor Pendidikan mengesahkan kebutuhan intervensi yang ditunjukkan oleh akreditasi, sehingga menciptakan model *holistic management* yang adaptif terhadap perubahan mutu tahunan.

Copyright © 2026 The Author(s)

Matriks Keselarasan pada penelitian ini berfungsi sebagai alat diagnostik yang menunjukkan area integrasi fungsional yang belum berjalan optimal antara kedua sistem mutu. Berdasarkan matriks ini, intervensi yang berbeda bisa diterapkan pada satuan pendidikan di kelompok kesenjangan mutu negatif dengan prioritas yang berbeda sehingga pembenahan bisa lebih tepat sasaran.

Implikasi Kebijakan

Ketidakselarasan antara mutu kelembagaan dan hasil belajar yang disebabkan karena tidak terintegrasinya sistem mutu menuntut respons kebijakan yang holistik, mencakup penyesuaian pada level sistemik (evaluasi eksternal) hingga level implementasi di satuan pendidikan (proses internal). Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan tiga strategi pendekatan yang saling melengkapi :

1. Integrasi Sistem Mutu Eksternal dan Pemanfaatan Data Objektif.
   a) Pemanfaatan Kebijakan Automasi Akreditasi.
      Kebijakan automasi akreditasi pada akreditasi ulang (BAN-PDM, 2025) perlu diimplementasikan secara konsisten dengan menjadikan data Rapor Pendidikan sebagai dasar penetapan status akreditasi, bukan sekedar pertimbangan tambahan. Mekanisme ini akan menciptakan hubungan sebab akibat yang jelas antara perbaikan proses pembelajaran (*technical core*) dengan status akreditasi.
   b) Penguatan Validitas Data Rapor Pendidikan.
      Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) yang menjadi input Rapor Pendidikan perlu dilakukan dengan integritas tertinggi di seluruh satuan pendidikan. Validitas data ini penting, karena Rapor Pendidikan dapat merepresentasikan kondisi proses pembelajaran yang sesungguhnya.
   c) Optimalisasi Forum Koordinasi.
      Hasil akreditasi dan Rapor Pendidikan perlu dibahas secara komparatif dalam forum koordinasi resmi, sehingga analisis kesenjangan mutu menjadi agenda strategis dalam sistem penjaminan mutu pendidikan daerah.
2. Penguatan PBD dan Peningkatan Kapasitas *Technical Core.*

   Mengingat ketidakefektifan *technical core* terjadi karena lemahnya mekanisme PBD di tingkat satuan pendidikan, kebijakan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas guru dan kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan siklus PBD secara konsisten. Penguatan kapasitas ini diwujudkan melalui tiga langkah sebagai berikut :
   a) Peningkatan Kompetensi Digital dan Analisis Data.
      Kebijakan pelatihan dan pendampingan harus difokuskan pada kemampuan guru dan kepala satuan pendidikan untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan merumuskan program Benahi berdasarkan data Rapor Pendidikan, bukan sekadar menyalin rekomendasi. Pelatihan harus spesifik pada analisis dimensi Input dan Proses yang terbukti menjadi faktor penentu (melalui temuan anomali keberhasilan).
   b) Insentif Berbasis Kinerja Proses.
      Kebijakan daerah harus mulai memberikan pengakuan pada satuan pendidikan yang menunjukkan perbaikan konsisten dalam dimensi proses Rapor Pendidikan (misalnya, peningkatan kualitas pembelajaran), bukan hanya memberikan insentif atau pengakuan berdasarkan status akreditasi atau nilai rapor yang tinggi,. Hal ini mendorong motivasi internal guru dan kepala satuan pendidikan untuk terlibat dalam PBD secara substantif (Purwadi et al., 2025).
   c) Integrasi PBD dalam Pengawasan.
      Mekanisme pengawasan harus memastikan bahwa siklus PBD terlaksana secara berkala dan terinternalisasi, bukan hanya sebagai laporan tahunan. Pengawasan harus

berfokus pada bukti implementasi perbaikan *technical core*, bukan lagi kelengkapan administrasi.

3. Intervensi Terdiferensiasi Berbasis Matriks Keselarasan.

Temuan Matriks Keselarasan (perbandingan akreditasi dan komposit Literasi-Numerasi) memberikan dasar kebijakan untuk intervensi yang berbeda sesuai dengan kelompok kesenjangan mutu satuan pendidikan. Berdasarkan peta kesenjangan tersebut, strategi intervensi dirancang sebagai berikut :

a) Penyediaan Peta Jalan Intervensi.
   Matriks Keselarasan perlu diadopsi sebagai alat identifikasi awal untuk memetakan satuan pendidikan berdasarkan profil kesenjangannya
b) Kelompok Kesenjangan Mutu Negatif
   Intervensi harus intensif, difokuskan pada pembenahan *technical core* (output proses pembelajaran, yaitu literasi-numerasi) secara mendalam, dengan pelaksanaan pendampingan PBD yang ketat
c) Kelompok Kesenjangan Mutu Positif
   Satuan pendidikan dalam kelompok ini perlu diidentifikasi sebagai sumber praktik baik dan difasilitasi untuk menjadi mentor, sehingga perbaikan bersifat horizontal dan adaptif.
d) Alokasi Sumber Daya yang Tepat Sasaran
   Pengalokasian sumber daya perlu dihubungkan dengan hasil analisis matriks keselarasan, dengan prioritas pada program pelatihan guru dan pengadaan media pembelajaran yang spesifik untuk satuan pendidikan di kesenjangan mutu negatif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, sehingga tidak menguji hubungan kausal antara akreditasi dan hasil belajar. Kedua, data yang digunakan merupakan data sekunder berbasis kategori, sehingga tidak menggambarkan variasi skor numerik secara lebih rinci. Ketiga, penelitian tidak mengobservasi langsung proses pembelajaran di kelas, sehingga faktor-faktor spesifik pada *technical core* hanya diinterpretasikan berdasarkan kerangka teoretis dan literatur. Keterbatasan ini menyebabkan temuan penelitian lebih bersifat pemetaan kondisi mutu daripada penjelasan mendalam mengenai mekanisme penyebab kesenjangan.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan campuran kuantitatif–kualitatif untuk menggali lebih dalam faktor-faktor proses pembelajaran yang mempengaruhi kesenjangan mutu. Studi kasus mendalam pada satuan pendidikan dalam kelompok kesenjangan mutu positif penting dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik pada *technical core*. Kajian kualitatif juga diperlukan untuk menganalisis penyebab bertahannya budaya kepatuhan administratif pada satuan pendidikan yang mengalami kesenjangan mutu negatif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan model indeks keselarasan yang lebih komprehensif dengan pembobotan statistik, serta melibatkan variabel tambahan seperti kualitas guru, kepemimpinan sekolah, dan iklim pembelajaran

Kesimpulan

Penelitian ini secara empiris menunjukkan adanya kesenjangan mutu antara peringkat akreditasi dan komposit Literasi–Numerasi satuan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan. Temuan ini menegaskan bahwa mutu struktural yang direpresentasikan oleh status akreditasi belum secara konsisten selaras dengan capaian hasil belajar siswa sebagai indikator kinerja pembelajaran (*technical core*). Kondisi tersebut mengindikasikan belum terbangunnya keterhubungan yang kuat antara sistem evaluasi eksternal dan mekanisme perbaikan internal di

Copyright © 2026 The Author(s)

tingkat satuan pendidikan. Praktik penjaminan mutu masih menunjukkan kecenderungan berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, sementara pemanfaatan data hasil belajar untuk mendorong perbaikan berkelanjutan belum berlangsung secara optimal.

Pendekatan matriks keselarasan dalam penelitian ini membantu memperjelas pola hubungan antara status akreditasi dan capaian hasil belajar, terutama dalam mengidentifikasi kelompok satuan pendidikan yang mengalami kesenjangan mutu. Melalui pemetaan tersebut, dinamika kesesuaian dan ketidaksesuaian antara mutu struktural dan kinerja *technical core* dapat dipahami secara lebih sistematis dalam kerangka pengelolaan mutu pendidikan daerah. Meskipun demikian, hasil penelitian perlu dipahami dalam batas desain yang digunakan. Analisis bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder berbasis kategori, dan tidak menelusuri mekanisme sebab akibat secara langsung. Oleh karena itu, temuan penelitian ini lebih menegaskan pola keselarasan dan kesenjangan mutu daripada menjelaskan hubungan kausal antarvariabel. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pemanfaatan data hasil belajar sebagai dasar perbaikan mutu, sehingga sistem penjaminan mutu tidak berhenti pada pemenuhan indikator struktural, tetapi semakin berorientasi pada peningkatan kinerja pembelajaran (*technical core*) secara berkelanjutan.

References

Adiyaman, H., & Ozmantar, Z. K. (2023). Impact of Accreditation on Schools: An examination in Terms of Open System Elements. *Participatory Educational Research*, *10*(2), 174–194. https://doi.org/10.17275/per.23.35.10.2

Afriliandhi, C., & Hasanah, E. (2022). A Qualitative Study of Indonesian Teacher's Perspective About School Accreditation. *Journal of Education and Instruction*, *13*(1), 109–116. https://doi.org/10.47750/pegegog.13.01.13

Alenezi, S., Al-Eadhy, A., Barasain, R., AlWakeel, T. S., AlEidan, A., & Abohumid, H. N. (2023). Impact of external accreditation on students' performance: Insights from a full accreditation cycle. *Heliyon*, *9*(5). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15815

Asrijanty. (2019). Hubungan Akreditasi Sekolah, Hasil Ujian Nasional, dan Indeks Integritas Ujian Nasional. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, *4*(1), 1–14. https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i1.732

Asrikadayani, Mus, S., & Hasan. (2024). Rendahnya Peringkat Akreditasi pada Manajemen Sekolah Di UPTD SD Negeri 110 Inpress Mattompodalle. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(4). https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1007

Azizah, L. L., Az Zahra, N., & Lailatul Badri, F. (2024). Efektivitas Instrumen Penilaian Akreditasi terhadap Kinerja Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, *1*(4), 67–78. https://doi.org/10.61132/jupenkei.v1i4.81

BAN-PDM. (2025a). *Data Akreditasi Satuan Pendidikan*. https://ban-pdm.id/data-akreditasi-sekolah

BAN-PDM. (2025b). *Pedoman Umum Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025*. https://ban-pdm.id/documents/j/panduan-akreditasi

Gautam, Dr. A. S. (2024). Impact of National Assessment and Accreditation Council (NAAC) on Higher Education Institutions (HEIs) in India. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.4932646

Guziak, M., Świtajska, A. J., & Šantrić-Milićević, M. (2025). Accreditation Challenges in Polish Medical Education: Balancing the Rapid Surge in Medical Students' Numbers with Quality Standards. *Education Sciences*, *15*(9). https://doi.org/10.3390/educsci15091188

Hoy, W., & Miskel, C. (2012). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice (9th ed.)*. McGraw-Hill Higher Education.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2024). *Buku Saku Cara Melakukan Perencanaan Berbasis Data untuk Satuan Pendidikan*.

Meirani, R. K., Sobri, A. Y., & Sunarni. (2022). Analisis Permasalahan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Studi Kasus di SMK Cor Jesu Malang). *Kelola : Jurnal Manajemen Pendidikan*, (9), 203–211. https://doi.org/10.24246/j.jk.2022.v9.i2.p203-211

Musakirawati, Jemmy, Anggriawan, F., Triansyah, F. A., Akib, & Abdul Tahir. (2023). Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan Indonesia Terhadap Perencanaan. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan (JDMP)*, *7*(2), 201–208. https://doi.org/10.26740/jdmp.v7n2.p201-208

OECD. (2023). *What assessments and examinations of students are in place?: Education at a Glance 2023*. https://doi.org/10.1787/e13bef63-en

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Menengah, Pub. L. 38 (2023).

Purwadi, D., Connie, & Sumarsih. (2025). Implementasi Perencanaan Sekolah Berbasis Data. *Manajer Pendidikan : Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, *19*(01). https://ejournal.unib.ac.id/manajerpendidikan/article/view/41472

Pusat Asesmen Pendidikan. (2023). *Framework Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)-Edisi revisi tahun 2023*.

Rijn, P. van, Por, H.-H., McCaffrey, D. F., Bhaduri, I., & Bertling, J. (2024). A framework for comparing large-scale survey assessments: contrasting India's NAS, United States' NAEP, and OECD's PISA. *Frontiers in Education*, *9*, 1422030. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1422030

Shal, T., Ghamrawi, N., & Ghamrawi, N. A. R. (2024). Does Accreditation Lead to School Improvement? Perceptions of Educators in K-12 Settings. *SAGE Open*, *14*(3). https://doi.org/10.1177/21582440241281222

Shalahuddin, M., Miqdad Arromy, M., Syaf, S., Ruswandi, U., Samsul Arifin, B., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2025). Analisis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di Sekolah Menengah Atas. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, *14*(2). https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/1932

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif: Cetakan Ke-4* (Edisi kedua). Alfabeta.

Sukriyah, D., Nurmala, E., & Agustina, S. (2019). Hubungan Status Akreditasi Sekolah Dengan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Guru Dan Siswa. *Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, *4*(2). https://doi.org/10.26594/jmpm.v4i2.1697